KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Agung: Kunker Harus Selektif dan Transparan
Tanggal : Senin, 04 September 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Agung: Kunker Harus Selektif dan Transparan

● FAUZIAH MURSID

JAKARTA – Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono menilai, usulan kenaikan anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke luar negeri harus disertai proses yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemilihan kunker anggota dewan juga harus dilakukan secara selektif.

"Kalau ada yang keluar negeri, harus disampaikan ke publik. Kalau DPR *kan nggak* punya atasan kecuali rakyat sendiri, harus terbuka, harus transparan di samping akuntabel sehingga uang itu menjadi efektif," ujar Agung di Jakarta, akhir pekan lalu.

Agung mengaku, termasuk pihak yang setuju mengenai pembatasan kegiatan kunker anggota dewan ke luar negeri. Namun demikian, pembatasan bukan berarti kegiatan kunker ditiadakan. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, kunker ke luar negeri tetap dibutuhkan, apalagi dalam rangka proses legislasi atau dalam rangka kerja sama antarparlemen.

"Karena, kalau untuk dilarang juga akibatnya (kita bisa) seperti katak dalam tempurung nanti. Biar ada wawasan internasional, terbuka. Kedua, dalam rangka proses legislasi itu juga bisa dilakukan dengan bidang-bidang tertentu," ujarnya.

DPR mengusulkan kenaikan anggaran kunker dewan ke luar negeri sekitar 70 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Berdasarkan usulan, anggaran kunker ke luar negeri dinaikkan dari Rp 201,7 miliar di 2017 menjadi Rp 343,676 miliar untuk 2018.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pertimbangan usulan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri karena menyesuaikan kurs mata uang dolar AS. Selain itu, usulan kenaikan juga didasarkan atas upaya peningkatan kinerja dan diplomasi parlemen.

Taufik melanjutkan, adanya kenaikan anggaran bukan berarti ada perubahan dari intensitas kunker anggota dewan ke luar negeri. Lagi pula, rencana kenaikan masih sebatas usulan dan masih perlu mendapat persetujuan dari pemerintah.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, kenaikan anggaran kunker ke luar negeri tidak akan diakali anggota dewan.

"Saya rasa *nggak* mungkin kita curi uang itu. Sekarang era transparan, era terbuka. Siapa memakan, mencuri uang negara, diciduk," ucapnya.

Menurut Anton, anggota DPR memang perlu melakukan studi banding ke negara lain. Karena itu, dia pun heran kunker DPR ke luar negeri begitu dipermasalahkan publik. "Eselon IV saja ke luar negeri *nggak diributin*, DPR *diributin*," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal menerangkan, usulan kenaikan anggaran kunker sudah disepakati oleh komisi-komisi dan semua fraksi. "Kalau semua sudah setuju, kita Golkar setuju saja," katanya.

Dia menambahkan, hal paling utama adalah bukan soal kenaikan anggarannya, melainkan mengembalikan uang kunker yang sebelumnya tidak terpakai lantaran adanya moratorium. Adapun moratorium kunker anggota DPR ke luar negeri merupakan kebijakan dari ketua DPR sebelumnya, Ade Komaruddin.

"Banyak anggaran yang *nggak kepakai* untuk kunker, tidak terpakai semua. Saya malah *nggak* berangkat-berangkat," kata dia. ■ ed: eh ismail